

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Brotodiharjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*. Depok: Rajawali Press
- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Andi
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurmantu, Safri. 2008. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2008. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Saigan, Sondang. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemitro Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: PT. Eresco
- Soerjono, Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat

Sukardji, Untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika

Waluyo, dan Wirawan B Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wirawan B. Ilyas, dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta : Sekretariat Negara

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas

Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 40/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

3. JURNAL/KARYA TULIS ILMIAH

Andria, Harri. 2008. *Aspek Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Perdagangan Saham Di Bursa Efek*. Thesis. Universitas Indonesia. Program Magister Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Pertiwi, Puspita. 2014. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Di Kabupaten Sleman*. Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Pujangga, Krishna Adi. 2014. *Pelaksanaan Pembebasan PPNBM Low Cost Green Car Dikaitkan Dengan Fungsi Regulerend Dan Fungsi Budgeter*. Penulisan Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Hasan, Dahliana. 2009. *Sunset Policy dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal. Yogyakarta: Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM

4. ARTIKEL INTERNET

Forum Pajak, "Ini yang Harus Dipahami Sebelum Mengajukan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi", <http://forumpajak.org/ini-yang-harus-dipahami-sebelum-mengajukan-permohonan-penghapusan-sanksi-administrasi/>, *Update*: 08 Mei 2015, diakses pada tanggal 28 September 2015

Jati, Gatot Putro. "Diminta Revisi, Jokowi Malah Sebut Pajak Kurang Tinggi", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150429143216-78-50057/diminta-revisi-jokowi-malah-sebut-target-pajak-kurang-tinggi/>, *Update*: Rabu, 29 April 2015, diakses pada tanggal 05 Desember 2015

Kusuma, Dewi Rachmat. "Cerita Panjang Menkeu Soal Target Pajak Rp 1.295T itu Bukan Dari Langit". <http://finance.detik.com/read/2015/11/07/173302/3064896/4/cerita-panjang-menkeu-soal-target-pajak-rp-1295-t-itu-bukan-dari-langit/>, *Update*: Sabtu, 11 Juli 2015, diakses pada tanggal 10 Desember 2015

Sari, Elisa Valenta. "Penerimaan Pajak 2014 Meleset Rp 90 Triliun", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150105184140-78-22529/penerimaan-pajak-2014-meleset-rp-90-triliun/>, *Update*: Senin, 05 Januari 2015, 18.41 WIB, diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

Supriandi, Agust. "Lebih Dari 50% Wajib Pajak Belum Bayar Pajak", <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141014175233-78-6372/lebih-dari-50-wajib-pajak-belum-bayar-pajak/>, *Update*: Selasa, 14 Oktober 2015, diakses pada tanggal 28 September 2015

Surawijaya, Incuna. "Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015", <http://pajaktaxes.blogspot.com/2015/05/pengurangan-atau-penghapusan-sanksi.html>, *Update*: 25 Mei 2015, diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

Sipahutar, Tassia, "Direktorat Jenderal Pajak Terus Maju Jalankan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak", <http://www.pajak.go.id/content/news/direktorat-jenderal-pajak-terus-maju-jalankan-kebijakan->

penghapusan-sanksi-pajak/, diakses pada tanggal 08 Oktober 2015 dan
12 Oktober 2015

5. WEBSITE

<http://www.pajak.go.id>